

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) DI DESA KAYAKAH KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Rahma Rizkiyah¹, Ramona Handayani², Barkatullah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: rahmarizkiyah49@gmail.com

ABSTRAK

Menurunnya antusiasme anggota kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam pelatihan, kurang nya keberlanjutan kegiatan dan dukungan pasca-pelatihan. Selain itu, banyak anggota kelompok PEKKA tidak mematuhi peraturan wajib menabung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara *purposive sampling*, dengan total 12 orang. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Selanjutnya dilakukan uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi dan mengadakan *member check*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) di Desa Kayakah kurang terimplementasikan dengan baik, khususnya dalam aspek kualitas sumber daya manusia, sumber daya waktu, sumber daya finansial, organisasi informal, penerimaan dari anggota, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik. Namun, beberapa aspek telah terimplementasikan dengan baik, seperti dalam hal ukuran kebijakan, tujuan kebijakan, jumlah sumber daya manusia, organisasi formal, penerimaan dari pelaksana, koordinasi, komunikasi dan lingkungan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, faktor pendorong meliputi terciptanya hubungan yang baik dengan organisasi formal pemerintah, kelancaran koordinasi dan komunikasi, serta dukungan dari lingkungan sosial. Kedua, faktor penghambat meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketidaksesuaian waktu pelaksanaan program, minimnya dana dari tim pusat untuk PEKKA di wilayah Hulu Sungai Utara, rendahnya pendapatan anggota PEKKA, dan kurangnya bantuan dari pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian ini, disarankan kepada pihak terkait untuk memberikan insentif berupa dana tambahan kepada desa yang aktif mendukung program PEKKA, meningkatkan koordinasi dengan kelompok PEKKA, memperkuat pengawasan, serta melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya mematuhi peraturan menabung. Selain itu, diharapkan anggota dapat terlibat secara aktif dan memanfaatkan dengan baik pelatihan serta modal usaha yang diberikan.

Kata Kunci : Implementasi, Program, PEKKA

ABSTRACT

The decreasing enthusiasm of the members of the Women Heads of Households (PEKKA) Empowerment group in training, the lack of continuity of activities, and the lack of post-training support are some of the challenges faced. In addition, many group members do not comply with the mandatory savings regulation. Explore the implementation of the women's empowerment program as heads of households (PEKKA) and the factors that influence its implementation in Kayakah Village, Amuntai Selatan District, Hulu Sungai Utara Regency. In this study, the researcher used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, with a total of 12 people. After the data was collected, analysis was carried out through data reduction techniques, data presentation, drawing conclusions, and verification. Furthermore, data crebility is tested by extending observation, increasing persistence, triangulation and conducting member checks.

The results of the study indicate that the implementation of the women's empowerment program as heads of households (PEKKA) in Kayakah Village is still far from expectations, especially in terms of human resource quality, time management, financial availability, informal organizations, and acceptance from members in the economic and political context. However, some aspects have been implemented well, such as

in terms of policy size, policy objectives, number of human resources, formal organization, acceptance from implementers, and coordination and communication in the social environment. Factors influencing the implementation of this program are divided into two categories. First, driving factors include the creation of good relationships with formal government organizations, smooth coordination and communication, and support from the social environment. Second, inhibiting factors include the low quality of human resources, inappropriate timing of program implementation, minimal funds from the central team for PEKKA in the Hulu Sungai Utara region, low income of PEKKA members, and lack of assistance from the local government.

From the results of this study, it is recommended that related parties to provide incentives in the form of additional funds to villages that actively support the PEKKA program, improve coordination with PEKKA groups, strengthen supervision, and conduct ongoing socialization regarding the importance of complying with savings regulations. In addition, it is hoped that members can be actively involved and make good use of the training and business capital provided.

Keywords: *Implementation, Program, PEKKA*

PENDAHULUAN

PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) merujuk pada perempuan yang memegang peran sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab untuk mencari nafkah, mengelola rumah tangga, menjaga kelangsungan hidup keluarga, serta mengambil keputusan penting dalam keluarga mereka. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah perempuan yang mengalami berbagai kondisi, seperti kehilangan suami, bercerai, ditelantarkan, atau memiliki suami yang sakit. Termasuk juga perempuan yang berupaya menafkahi diri sendiri serta keluarganya, baik yang lajang maupun yang memiliki pasangan yang merantau. Dengan demikian, perempuan yang berperan sebagai penopang ekonomi dalam situasi-situasi tersebut dikenal sebagai Perempuan Kepala Keluarga (Julia Celves, 2024, dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial, dan Humaniora).

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, proporsi kepala keluarga perempuan mencapai 12,72%. Sayangnya, sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi di bawah garis kemiskinan (Widi, 2023). Banyak dari perempuan kepala keluarga tersebut termasuk dalam kelompok rentan, terutama dalam aspek sosial dan juga ekonomi. Data yang pernah dipublikasikan oleh Yayasan PEKKA pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 95% dari mereka bekerja disektor informal. Kebanyakan dari mereka terlibat dalam perdagangan, bertani, atau bekerja sebagai buruh kasar. Sebanyak 44,1% perempuan kepala keluarga memiliki pendapatan di bawah Rp500. 000 per bulan, sementara 32,6% lainnya memperoleh pendapatan sekitar Rp1. 000. 000. Sedangkan, hanya 18,3% yang memiliki penghasilan lebih dari Rp1. 000. 000 per bulan (Kerti, 2022).

Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, pemerintah pusat telah meluncurkan program yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Program ini bertujuan untuk memberikan pedoman untuk pembangunan industri rumahan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga serta kualitas hidup perempuan secara umum.

Berdasarkan catatan resmi di situs web Yayasan PEKKA, yayasan ini telah berhasil memperluas cakupannya hingga 34 provinsi di Indonesia. Di antara provinsi tersebut, 20 provinsi menjadi wilayah kerja intensif Yayasan PEKKA, yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, D. I. Yogyakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, D. I. Jakarta, dan Sulawesi Barat. Di wilayah-wilayah tersebut, terdapat total 78. 670 kepala keluarga perempuan. Lebih lanjut, distribusi anggota Yayasan PEKKA menunjukkan bahwa 24. 767 orang atau 31% berada di Pulau Jawa, 17. 314 orang atau 22% di Pulau Sumatera, 9. 169 orang atau 12% di Pulau Sulawesi, 9. 357 orang atau 12% di Pulau Kalimantan, serta 18. 063 orang atau 23% di Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku.

Sementara itu, upaya untuk menjangkau 14 provinsi lainnya masih terus dilakukan (Yayasan Pemberdayaan Kepala Keluarga Perempuan - PEKKA, 2020).

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan ada di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan, untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara beranggotakan 518 orang yang terbagi ke dalam 27 kelompok yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, dan Haur Gading, yang meliputi 12 desa yaitu Desa Kayakah, Murung Panggang, Pandulangan, Harusan Telaga, Panyiuran, Sungai Limas, Alabio, Banyu Tajun Hulu, Banyu Tajun Hilir, Hambuku Raya, Pondok Babaris dan Tambalang Tengah.

Kelompok PEKKA Sumber Makmur Mawar di Desa Kayakah telah berdiri sejak tahun 2017, dengan jumlah anggota sebanyak 54 orang. Program PEKKA ini bertujuan untuk memberikan dukungan, pelatihan, dan akses sumber daya kepada perempuan yang merupakan kepala keluarga, guna mendukung kemandirian ekonomi mereka. Melalui program ini, perempuan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, kesehatan, kewirausahaan, pendidikan, dan keluarga.

Namun, dalam pelaksanaannya, program PEKKA di Desa Kayakah belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Meski PEKKA sangat terkait dengan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, terutama perempuan kepala keluarga, kenyataannya banyak dari mereka masih menghadapi tantangan. Tingkat ekonomi wanita kepala keluarga tetap rendah, ditandai oleh pendapatan yang minim akibat keterbatasan keterampilan. Selain itu, kesadaran untuk menabung juga rendah, diakibatkan oleh meningkatnya pengeluaran sehari-hari. Potensi pangan dan sandang di desa ini juga belum dimanfaatkan secara optimal, ditambah dengan adanya tantangan dalam pendidikan serta pemahaman kesehatan di kalangan perempuan kepala keluarga yang masih terbatas. Oleh karena itu, diharapkan kehadiran program PEKKA di Desa Kayakah dapat benar-benar memberdayakan perempuan kepala keluarga agar menjadi lebih mandiri dan berdaya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan kepala keluarga, berbagai kegiatan telah dilakukan, di antaranya menyediakan modal pinjaman serta menawarkan beberapa kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, seperti membuat kerajinan tangan, makanan, dan minuman yang dapat dijual. Kegiatan-kegiatan itu diharapkan mampu membantu untuk meningkatkan pendapatan perempuan kepala keluarga.

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan penulis di Kelompok PEKKA Sumber Makmur Mawar Desa Kayakah, berikut adalah beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan:

1. Menurunnya antusiasme anggota kelompok PEKKA dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pendamping disebabkan oleh prioritas masing-masing anggota yang lebih memfokuskan diri pada kesibukan sehari-hari, seperti mengurus rumah tangga, anak-anak, dan lahan pertanian.
2. Minimnya keberlanjutan kegiatan yang dilakukan serta ketiadaan dukungan pasca-pelatihan untuk membantu anggota dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh, seperti bantuan dalam penyediaan bahan baku untuk menghasilkan produk, mengakibatkan keterampilan yang telah dipelajari tidak dapat berkembang dengan baik.
3. Banyak anggota kelompok PEKKA yang tidak mematuhi aturan wajib menabung, yang mencerminkan rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran mereka terhadap program. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa hampir semua anggota hanya memiliki keterampilan di bidang pertanian dan menganyam purun untuk membuat topi, tikar, atau bakul, serta hanya mengandalkan keterampilan tersebut sebagai satu-satunya sumber penghasilan.

Secara umum, istilah "kebijakan" yang dimaksud oleh Suharto (2015, p. 7) sepadan dengan kata "*policy*" dalam bahasa Inggris. Istilah ini dibedakan dari "kebijaksanaan" (*wisdom*) dan "kebijakan" (*virtues*). Dengan demikian, kebijakan juga dapat dipahami sebagai prinsip atau metode pengambilan keputusan yang dipilih untuk mengarahkan suatu tindakan.

Menurut Van Metter dan Van Horn telah merumuskan 6 variabel kunci yang dapat

mempengaruhi kinerja suatu kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan dalam mengukur kinerja suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada seberapa realistis ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut dalam konteks sosial dan budaya masyarakat yang menjadi target pelaksanaan. Jika ukuran atau tujuan tersebut tidak sejalan dengan realitas yang ada, pencapaian target kebijakan akan menjadi sulit.

2. Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya yang tersedia mempunyai dampak besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Di antara berbagai faktor yang ada, sumber daya manusia menjadi yang paling krusial dalam proses ini. Kualitas sumber daya manusia yang sesuai dan memenuhi syarat, yang juga ditentukan secara politik, sangat penting selama fase implementasi. Jika kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia rendah, maka dari itu kinerja kebijakan publik bisa terpengaruh. Selain itu, aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah sumber daya finansial dan waktu.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Penting untuk memberikan pandangan khusus terhadap agen pelaksana. Karakteristik agen ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dalam proses implementasi. Misalnya, jika kebijakan bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat secara signifikan, diharapkan agen pelaksana memiliki karakter yang tegas dan patuh pada aturan serta sanksi yang berlaku. Dalam situasi di mana dampak kebijakan terhadap perilaku masyarakat tidak terlalu besar, tingkat ketegasan agen pelaksana dapat dikurangi. Selain itu, luasnya cakupan wilayah implementasi juga menjadi faktor penting yang menentukan keterlibatan agen; semakin besar cakupan wilayah, semakin banyak agen yang akan terlibat.

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana, apakah menerima atau menolak, memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hal ini sering kali disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak selalu merupakan hasil usulan masyarakat setempat yang lebih memahami masalah yang mereka hadapi. Kebijakan yang diterapkan sering kali bersifat "dari atas" dan tidak cukup mempertimbangkan kebutuhan serta keinginan masyarakat.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi antarorganisasi adalah elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam implementasi kebijakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi publik, menurut perspektif Van Metter dan Van Horn, adalah pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Faktor sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat menjadi penyebab utama kegagalan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan kondisi lingkungan eksternal yang mendukung dalam upaya melaksanakan kebijakan.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa variabel yang dianalisis memiliki sifat yang unik. Penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan pokok pembahasan secara rinci. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memperjelas berbagai aspek dan tujuan yang ada.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, di mana penulis

mencari informasi yang relevan dengan penelitian dari dokumen dan arsip yang ada.

PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

a. Ukuran Kebijakan

Ukuran Kebijakan adalah suatu acuan untuk dapat mengukur kinerja dari implementasi kebijakan dengan menegaskan standard dan sasaran yang harus dicapai oleh pelaksanaan kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, ukuran kebijakan telah berjalan dengan baik dalam mendukung program pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA). Program ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang mencakup janda, baik yang bercerai maupun yang ditinggal mati oleh suami, serta perempuan yang meskipun masih bersuami namun berperan sebagai kepala keluarga atau turut membantu perekonomian keluarga. Perempuan yang termasuk dalam kategori janda disebut sebagai PEKKA biasa, sedangkan yang masih bersuami dan memenuhi kriteria disebut PEKKA luar biasa.

b. Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari implementasi tersebut sudah tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Berhasil atau tidaknya suatu tujuan sesuai dengan peran dari para pelaksana kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, tujuan kebijakan yang ada sudah berjalan baik dalam mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Kejelasan dan pemahaman yang baik terhadap program ini oleh semua pihak terkait telah berkontribusi pada pencapaian tujuan PEKKA, yaitu meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri perempuan sebagai kepala keluarga melalui pemberdayaan ekonomi. Ini tercapai lewat penyediaan modal usaha, akses terhadap program simpan pinjam, dan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dalam kerangka PEKKA.

2. Sumber Daya

Keberhasilan dari proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemanfaatan dari sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting untuk menentukan keberhasilan proses ini. Setiap tahap implementasi memerlukan kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas dan juga sudah sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan oleh kebijakan yang disusun secara politik. Namun, jika kompetensi sumber daya tersebut tidak ada, maka kinerja kebijakan publik menjadi sulit diharapkan.

Selain dari sumber daya manusia, terdapat sumber daya lain yang harus dipertimbangkan, seperti sumber daya finansial dan waktu. Meskipun ada sumber daya manusia yang kompeten dan mampu, ketiadaan dana dari anggaran akan menyulitkan pencapaian tujuan kebijakan publik. Begitu juga, jika sumber daya manusia dapat bekerja dengan giat dan pendanaan berjalan dengan baik, tetapi terhambat oleh waktu yang terlalu ketat, ini dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

1) Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia atau pelaksanaannya adalah individu yang produktif dan berkualitas dalam bekerja sebagai penggerak dari organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, kualitas sumber daya manusia yang ada masih kurang baik untuk mendukung implementasi program pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA). Banyak anggota yang merasa kurang diberdayakan, dan kegiatan pelatihan hanya dilaksanakan satu atau dua kali, sehingga mereka belum sepenuhnya menguasai keterampilan yang diajarkan. Selain itu, tidak ada dukungan lanjutan setelah pelatihan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh, yang mengakibatkan tidak adanya peningkatan keterampilan di antara anggota.

Hal ini tidak sejalan dengan teori menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn,

sebagaimana dikutip oleh Reno Affrian (2023:29-32), yang menyatakan bahwa keahlian dalam memanfaatkan sumber daya sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, manusia merupakan sumber daya yang paling krusial dalam mencapai keberhasilan tersebut. Beberapa tahap dalam proses implementasi menyoroti pentingnya tersedianya sumber daya manusia dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang diatur oleh suatu kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Oleh karena itu, kurangnya kompetensi dan kapabilitas sumber daya dapat berdampak negatif pada kinerja kebijakan publik.

2) Jumlah Sumber Daya Manusia

Dalam konteks sumber daya manusia, jumlah merujuk pada total individu yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, jumlah sumber daya manusia sudah berperan dengan baik dalam mendukung implementasi program PEKKA. Di desa ini, terdapat 54 orang yang menunjukkan potensi sumber daya manusia yang memadai.

Hal ini sejalan dengan pendapat Donald Van Metter dan Carl Van Horn, sebagaimana diungkapkan oleh Reno Affrian (2023:29-32), yang menyatakan bahwa keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suksesnya suatu program. Beberapa tahapan dalam proses implementasi menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang diatur dalam kebijakan dan telah disepakati secara politik. Dengan demikian, kekurangan dalam kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia dapat berdampak negatif pada kinerja kebijakan publik.

b. Sumber Daya Waktu

Sumberdaya waktu adalah waktu yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan atau pelatihan-pelatihan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, sumber daya waktu masih kurang baik dalam mendukung pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Meskipun jadwal kegiatan telah disepakati oleh para anggota, banyak di antara mereka yang tidak dapat menghadiri pertemuan akibat kesibukan sehari-hari, seperti bertani dan, yang lebih jarang lagi, menganyam purun. Oleh karena itu, inti kelompok perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kegiatan anggota yang tidak memiliki kesibukan, mengingat tidak semua anggota dapat mengikuti pelatihan karena pekerjaan lain.

c. Sumber Daya Finansial

Sumberdaya finansial merujuk pada semua aset dan dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, kondisi sumber daya finansial masih kurang baik untuk mendukung implementasi program pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA). Meskipun dana dari SEKNAS dan iuran anggota sudah digunakan, tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Bahkan, saat ini dana dari pusat tidak lagi dialokasikan untuk daerah Hulu Sungai Utara, mengingat adanya perluasan wilayah di daerah Balangan dan Batu Mandi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Fokus utama perhatian dalam implementasi kebijakan publik adalah pada agen pelaksana, baik dalam bentuk organisasi formal maupun informal. Karakteristik agen pelaksana sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Sebagai contoh, jika tujuan kebijakan publik adalah mengubah perilaku manusia secara drastis, agen pelaksana yang ditunjuk harus memiliki karakter yang tegas dan disiplin terhadap aturan serta sanksi hukum. Namun, jika kebijakan publik tersebut tidak berpotensi untuk mengubah perilaku mendasar, maka karakter

agen pelaksana dapat lebih fleksibel, tanpa perlu terlalu keras dan tegas.

Di samping itu juga, cakupan dari wilayah implementasi kebijakan penting untuk menentukan siapa agen pelaksana yang tepat. Semakin luas cakupan dari implementasi kebijakan, maka semakin banyak agen yang akan terlibat.

a. Organisasi Formal

Organisasi formal merupakan suatu entitas yang mempunyai struktur yang jelas, dengan pembagian tugas yang sudah terdefinisi secara baik dan tujuan yang ditentukan dengan jelas.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, keberadaan organisasi formal telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kerjasama yang terjalin dengan berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dukcapil, Dinas Sosial, BPJS, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), serta Bappeda. Selain itu, hadir pula organisasi non-pemerintah seperti Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan yayasan-yayasan yang mendukung kegiatan PEKKA.

Lebih jauh lagi, luasnya cakupan wilayah dalam implementasi kebijakan juga perlu dipertimbangkan untuk menentukan siapa agen pelaksana yang tepat. Jika cakupannya semakin meluas, maka jumlah agen yang terlibat juga akan bertambah.

b. Organisasi Informal

Organisasi informal adalah kumpulan dari individu yang terbentuk tanpa tujuan bersama yang disadari. Meskipun demikian, hubungan-hubungan yang terbentuk di antara mereka pada akhirnya dapat mengarah pada tujuan bersama yang tidak diakui secara eksplisit.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, keberadaan organisasi informal dalam implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) masih kurang baik, karena tidak terlibat. Hal ini bertentangan dengan pemikiran Donald Van Metter dan Carl Van Horn, yang dikutip oleh Reno Affrian (2023:29-32), yang menekankan pentingnya peran agen pelaksana baik dari organisasi formal maupun informal dalam implementasi kebijakan publik. Kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana yang tepat dan sesuai.

4. Disposisi Para Pelaksana

Sikap para pelaksana, baik menerima maupun menolak, memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sulit dihindari, mengingat kebijakan yang diterapkan seringkali bukan merupakan hasil pemikiran dari masyarakat lokal yang memahami dengan baik permasalahan yang mereka hadapi. Sebaliknya, kebijakan yang akan diimplementasikan biasanya berasal dari keputusan "dari atas" (top-down), dimana para pengambil keputusan mungkin tidak memahami, atau bahkan tidak dapat menjangkau, kebutuhan, keinginan, atau isu yang ingin diselesaikan oleh masyarakat.

a. Penerimaan dari Pelaksana

1) Penerimaan dari Pelaksana

Penerimaan dari pelaksana mencerminkan sikap yang menunjukkan persetujuan atau penerimaan terhadap kebijakan yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, penerimaan dari pelaksana sudah baik. Seluruh pihak terlibat menjalin hubungan yang baik dan saling bekerja sama dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Karena hak ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab mentor atau pelatih yang ditugaskan oleh Tim Pusat.

2) Penerimaan Dari Anggota

Penerimaan dari anggota merupakan sikap yang menunjukkan persetujuan dan antusiasme terhadap suatu kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, penerimaan dari anggota dalam kegiatan pelatihan masih kurang baik. Dimana antusiasme anggota menurun, dengan

beberapa dari mereka memilih untuk tidak menghadiri kegiatan tersebut karena adanya prioritas lain yang dianggap lebih penting. Ada pula anggota yang lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan yang akan memberikan penghasilan langsung daripada berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Fenomena ini bertentangan dengan pandangan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn, sebagaimana dikutip dalam karya Reno Affrian (2023: 29-32). Mereka menyatakan bahwa dari sikap penerimaan ataupun penolakan dari pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Ketidaksiuaian ini mungkin terjadi karena kebijakan yang diterapkan tidak merupakan hasil dari rumusan komunitas lokal yang memahami dengan baik permasalahan yang mereka hadapi. Sebaliknya, kebijakan tersebut datang dari atas (top down), seringkali tanpa kepekaan terhadap kebutuhan, keinginan, atau tantangan yang dirasakan masyarakat.

5. Koordinasi antar Organisasi Pelaksana

Koordinasi adalah alat yang sangat efektif dalam implementasi kebijakan publik. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah terintegrasi dengan baik agar proses implementasi dapat berjalan dengan lancar.

a. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu mekanisme yang sangat efektif dalam pelaksanaan kebijakan publik. Semakin baik koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, semakin kecil juga kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan kecil. Demikian pula, hal ini berlaku sebaliknya.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, koordinasi yang telah terjalin berjalan dengan baik. Semua pihak terlibat menjalin hubungan positif dan saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Hubungan antara kelompok PEKKA dan tim pusat berlangsung lancar, dengan dukungan dan arahan yang diberikan oleh tim pusat yang cepat dan bersahabat. Dengan demikian, segala kendala atau masalah dapat diselesaikan dengan segera, mencerminkan profesionalisme serta sistem koordinasi yang responsif, yang mendukung kelancaran kegiatan program PEKKA di desa.

b. Komunikasi

Komunikasi menjadi kunci utama dalam mencapai koordinasi yang efektif dalam proses implementasi.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat sudah terjalin dengan baik. Oleh karena itu, mereka saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Hubungan yang lancar antara pengurus, anggota kelompok, dan tim pusat menjadi faktor utama dalam keberhasilan tersebut.

Pernyataan ini sejalan dengan teori yang diajukan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn, seperti yang diringkas dalam Reno Affrian (2023:29-32). Mereka menekankan bahwa koordinasi merupakan alat yang sangat efektif dalam implementasi kebijakan publik. Ketika komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi berlangsung dengan baik, kemungkinan terjadinya kesalahan menjadi jauh lebih kecil, dan sebaliknya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Aspek yang terakhir perlu diperhatikan dalam menilai kinerja dari implementasi publik, menurut perspektif Van Metter dan Van Horn, yaitu sejauh mana lingkungan eksternal dapat berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik yang sudah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat menjadi penyebab utama kegagalan dalam implementasi sebuah kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kondisi lingkungan eksternal dalam setiap upaya untuk melaksanakan kebijakan.

a. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan area di mana berbagai interaksi dengan lingkungan sekitar berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial di Desa Kayakah berada pada kondisi yang baik. Ini juga didukung oleh keterlibatan aktif dari keluarga, masyarakat, dan aparat desa, yang mendorong banyak orang untuk bergabung. Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga kesempatan untuk meminjam modal guna memulai usaha, sehingga dapat meningkatkan daya dan penghasilan mereka. Banyak individu melihat ini sebagai peluang yang berharga untuk memperbaiki taraf hidup, baik dari segi keterampilan maupun ekonomi.

b. Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi merujuk pada kondisi keuangan masyarakat, yang umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah, kondisi anggotanya masih kurang baik. Sebagian mereka berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan bekerja sebagai pengrajin, peternak, petani, guru honorer, serta pemilik toko sembako kecil. Situasi ini menyebabkan beberapa anggota tidak disiplin dalam menabung, meskipun jumlahnya tidak banyak, yang menjadi kendala dalam pengembangan usaha. Anggota yang memerlukan modal usaha pun terhambat, tidak dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal akibat batasan ekonomi dan rendahnya disiplin menabung.

c. Lingkungan Politik

Lingkungan politik mencakup hukum, lembaga pemerintah, dan kelompok penekan yang memengaruhi serta menyusun interaksi antara organisasi dan individu di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kayakah terkait lingkungan sosial kurang baik, karena tidak pernah ada kerja sama dengan pihak politik baik itu dari pihak inti kelompok ataupun anggota, sesuai dengan prinsip netralitas dan independensi yang dijunjung oleh PEKKA.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program PEKKA di Desa Kayakah.

1. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Ketidaksiesuaian Waktu Pelaksanaan Program
- c. Minimnya dana dari Tim Pusat untuk PEKKA wilayah HSU
- d. Pendapatan Anggota PEKKA masih Rendah
- e. Tidak Adanya Bantuan dari Pemerintah Daerah

2. Faktor Pendukung

- a. Terciptanya Hubungan yang baik dengan Organisasi Formal Pemerintah
- b. Baiknya Proses Koordinasi dan Komunikasi
- c. Banyaknya dukungan dari lingkungan sosial

SIMPULAN

Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kurang terimplementasikan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan beberapa indikator sebagai berikut: *Pertama*, Ukuran kebijakan di Desa Kayakah telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh program. Begitu juga dengan tujuan kebijakan yang jelas untuk meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri perempuan sebagai kepala keluarga. *Kedua*, pada indikator sumber daya manusia yaitu kualitas dari sumber daya manusia di desa kayakah ini masih kurang baik, karena terbatasnya pelatihan yang diselenggarakan membuat anggota merasa kurang diberdayakan dan tidak ada dukungan yang memadai setelah pelatihan. Di sisi lain, jumlah sumber daya manusia di Desa Kayakah sudah baik, dengan sekitar 50-54 anggota yang terlibat. Namun, untuk sumber daya waktu yang dialokasikan

untuk kegiatan masih belum baik dan sering bentrok dengan kesibukan sehari-hari para anggota. Dari segi sumber daya finansial di Desa Kayakah juga masih kurang baik, karena dana yang ada hanya cukup untuk konsumsi selama pelatihan. *Ketiga*, organisasi formal di Desa Kayakah sudah berjalan dengan baik, dengan beberapa dinas yang terlibat, namun untuk organisasi informal masih kurang baik karena tidak ada partisipasi. *Keempat*, penerimaan dari pelaksana program, seperti pelatih dan dinas terkait, berjalan sudah baik. Namun, untuk penerimaan dari anggota masih kurang baik, mengingat kehadiran mereka yang masih sangat sedikit dibandingkan total anggota. *Kelima*, koordinasi antara kelompok PEKKA dan tim pusat di Desa Kayakah berjalan dengan baik, sementara komunikasi juga sudah baik karena terjalin lancar melalui pengumuman yang disampaikan. *Keenam*, lingkungan sosial di desa ini didukung oleh keluarga, masyarakat, dan aparat desa, yang memberikan dukungan yang baik terhadap program ini. Namun, dalam aspek lingkungan ekonomi, masih banyak anggota PEKKA yang berasal dari kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga situasi ini menjadi tantangan tersendiri. Terakhir, dalam aspek lingkungan politik, di Desa Kayakah masih kurang baik, karena tidak pernah menjalin kerjasama. Secara keseluruhan, meski ada beberapa aspek positif dalam implementasi program PEKKA di Desa Kayakah, masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, Reno. 2023. *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Anggara, Sahya. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Fauziah, A. R., Meigawati, D., & Mulyadi, A., 2023. *Effectiveness Program for Women Head of Family (PEKKA) In Sukabumi City*. Vol. 12 No. 1 45-46.